

Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan indonesia dalam konteks pergaulan dunia

wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. berdasarkan lembaga ketahanan nasional tahun 1999 pengertian wawasan nusantara adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional

wawasan nusantara ini bisa dibagi menjadi dua pengertian yakni pengertian secara etimologis dan pengertian terminologi.

1. Etimologi

secara etimologi, kata wawasan nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. wawasan dari kataawas (Bahasa Jawa) yang artinya pandangan. sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. kata “nusa” dalam bahasa sansekerta berarti pulau atau kepulauan. dan kata “Antara” memiliki padanan dalam bahasa latin, *in* dan *terra* yang berarti antara atau dalam suatu kelompok, kata nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata nusantara sendiri bermula dari bunyi Sumpah Pala dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, Tertulis di dalam Kitab Paraton. bunyi sumpah tersebut sebagai berikut:

“Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa.”

Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama indonesia dan juga Malaysia. Kemudian Kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*), pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *indo/indu* yang berarti Hindu/Hindia dan *nesia/nesos* yang berarti pulau. Dengan demikian kata nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata indonesia, yang menunjuk pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia dan Australia.

2. terminologis

Untuk Pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri.

rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998:

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya Konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. isinya sebagai berikut:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau- pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas- lekasnya dengan Undang-Undang”

yang intinya mendeklarasikan bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah daratan Indonesia. Ini mengubah pandangan sebelumnya yang berdasarkan Ordonansi 1939, di mana laut hanya diakui sejauh 3 mil dari garis pantai.

Kemudian pada tanggal 30 April 1982, PBB mengeluarkan dokumen yang bernama *“The United Nation Convention on the Law of the Sea”* (UNCLOS). yang mengakui Indonesia sebagai negara kelautan yang memiliki wilayah laut sebesar 5.9 Juta km²

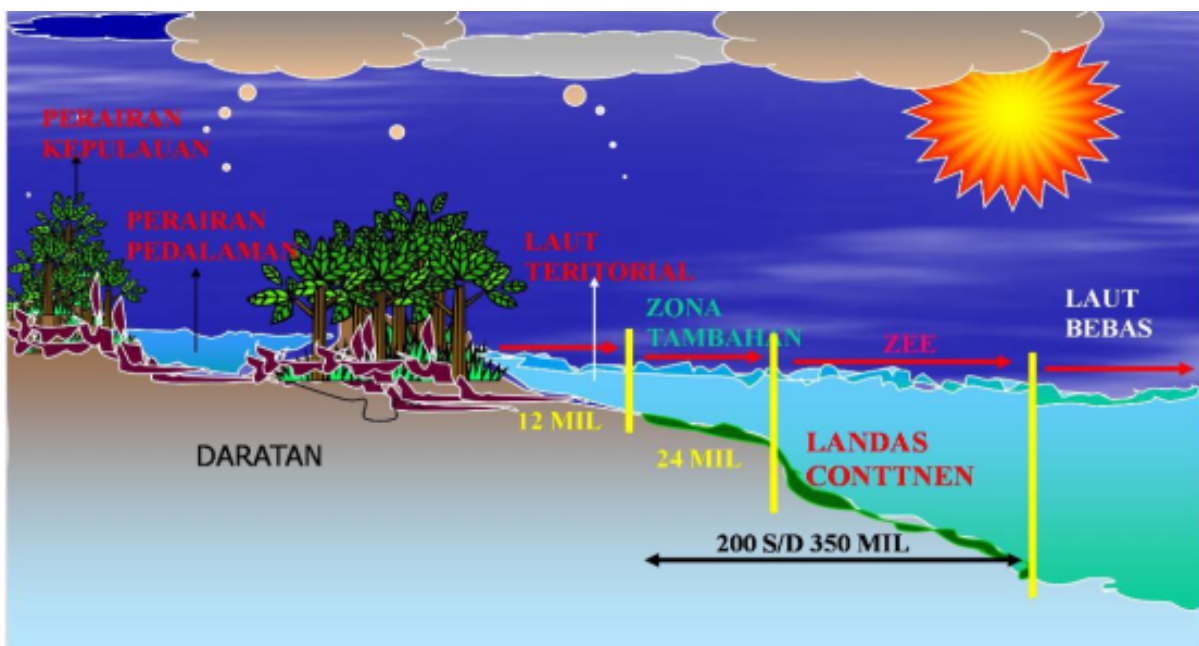


Figure 1: Grafik zona perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1992

Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Pada awalnya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terpecah belah dan berfokus pada masing-masing suku dikarenakan diadu domba dalam masa penjajahan oleh Belanda yang disebut teknik politik *Devide et Impera* yang mana kondisi sosial budaya Indonesia hanya berputar pada satu golongan saja dan tidak ada kesatuan, namun kemudian mulainya keluar bibit-bibit persatuan yang dimulai dengan peristiwa Kebangkitan Nasional pada Tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang kemudian berhasil diwujudkan dengan proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berhasil menyatukan Indonesia, oleh karena

itu sebelum Deklarasi Djuanda 1957 pun konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa.

Latar Belakang Politik Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara menjadi konsep politik kenegaraan untuk mempertahankan kesatuan wilayah dan bangsa. Letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik), juga memengaruhi pandangan geopolitik Indonesia.

Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Esensi

- Kesatuan Wilayah: Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau.
- Persatuan bangsa: Keragaman suku, agama dan budaya harus dipandang sebagai satu kesatuan.

Urgensi:

- Mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.
- Mencegah disintegrasi bangsa.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil dan merata

Tantangan dan Potensi

Potensi Positif:

- kekayaan sumber daya alam yang melimpah
- Letak geografis strategis untuk perdagangan dan pertahanan

Potensi Negatif

- Ancaman Disintegrasi akibat perbedaan suku, agama dan budaya.
- Masalah pembangunan yang tidak merata, terutama di daerah tertinggal.

Implementasi Wawasan Nusantara

- Politik: Kesatuan wilayah dan bangsa dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
- Sosial Budaya: Menghargai keragaman budaya sebagai kekuatan bangsa.
- Pertahanan dan Keamanan: Ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman terhadap seluruh bangsa.